

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini di Bupati dan DPRD. DPRD adalah mitra sejajar Bupati yang hubungan saling melengkapi, sehingga diharapkan memudahkan pelaksanaan paradigma pembangunan dan tercapainya *Good Governance*.

DPRD sebagai wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya, dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, dituntut berperan aktif dalam pelaksanaannya karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program dan kegiatan yang dianggarkan Sekretariat DPRD adalah program dan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah seperti program peningkatan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas SDM, juga yang tak kalah penting adalah program dan kegiatan yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA OPD) yang akan dijadikan acuan bagi organisasi dalam upaya penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 telah disusun, namun dengan adanya pergeseran anggaran, usulan perubahan terkait penambahan kegiatan, perubahan indikator, target kinerja dan pagu indikatif, sebelum tertuang dalam usulan Perubahan APBD, maka wajib dilakukan Perubahan Renja Perangkat daerah terlebih dahulu hal ini sesuai dengan tahapan -tahapan perencanaan anggaran dan dalam rangka mendukung adanya dokumen perencanaan yang baik.

2. DASAR HUKUM

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan APBD Kab. Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.
10. Peraturan Kepala Daerah Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD dimaksudkan sebagai satu dokumen perencanaan yang memuat perubahan program/kegiatan baik menyangkut perubahan indikator, target kinerja, pagu indikatif, lokasi atau kelompok sasaran.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD adalah:

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat secara umum melalui pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat;
2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat
3. Terwujudnya pencapaian target kinerja program dan kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Tersedianya dokumen pendukung Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

4. DASAR PERTIMBANGAN

Dasar pertimbangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 adalah adanya pergeseran anggaran, penambahan anggaran dan penambahan volume sub kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 salah satunya dikarenakan adanya Peraturan menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Sehingga dengan adanya PMK tersebut, ada sub kegiatan yang semula tidak dianggarkan harus dianggarkan dan subkegiatan yang berkurang anggarannya dan beberapa sub kegiatan yang bertambah anggarannya.

Selain itu, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini, diperlukan adanya penambahan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, .

Usulan penambahan anggaran dan volume pada beberapa sub kegiatan dikarenakan anggaran yang ada pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 terbatas atau tidak mencukupi, namun, sub kegiatan tersebut sangat penting untuk tetap dilaksanakan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 16 (enam belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp.34.374.851.424,- terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.17.307.700.592,- atau 50,35%.

Dari seluruh sub kegiatan terdapat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen, yaitu :

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi fisik/output sebesar 54,55 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.

4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
5. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen, karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
6. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
7. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi fisik/output sebesar 46,15 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
8. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
9. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi

fisik/output tidak mencapai 100,00 persen sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.

10. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
11. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan , realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
12. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
13. Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
14. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, realisasi fisik/output sebesar 58,33 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.

15. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik/output sebesar 60,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena terdapat beberapa pengadaan barang yang belum terealisasi terdapat usulan perubahan Standar Harga Satuan (SSH).
16. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
17. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi fisik/output sebesar 64,29 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
18. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
19. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
20. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi fisik/output sebesar 33,30 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi yang diperlukan.

21. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai realisasi kinerja disesuaikan dengan jumlah surat masuk dan surat keluar selama triwulan II.
22. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi fisik/output sebesar 50,00 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100 persen.
23. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi fisik/output sebesar 50,00 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100 persen.
24. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
25. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
26. Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, realisasi fisik/output sebesar 75,86 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai

dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.

27. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 60,61 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
28. Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 40,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
29. Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
30. Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini direncanakan untuk pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD, sedangkan sampai dengan triwulan II tidak terdapat Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
31. Sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai

dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.

32. Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi sub kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100,00 persen.
33. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah , realisasi fisik/output sebesar 0,00 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda DPRD.
34. Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda, realisasi fisik/output sebesar 14,29 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda DPRD dalam pembahasan Ranperda.
35. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena ranperda inisiatif DPRD masih dalam proses pembahasan Naskah Akademis di UNILA (Pihak Ketiga).
36. Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan agenda kerja DPRD, belum memasuki agenda pembahasan KUA dan PPAS.
37. Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00

persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan agenda kerja DPRD, belum memasuki agenda pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.

38. Sub kegiatan Pembahasan APBD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan agenda kerja DPRD, belum memasuki agenda Pembahasan APBD.
39. Sub kegiatan Perubahan Pembahasan APBD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan agenda kerja DPRD, belum memasuki agenda Pembahasan Perubahan APBD.
40. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena pelaksanaan sub kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kerja DPRD lainnya dan juga adanya pengaduan masyarakat atau permasalahan di daerah bidang Pemerintahan dan Hukum sehingga perlu dilakukan kunjungan kerja.
41. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena pelaksanaan sub kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kerja DPRD lainnya dan juga adanya pengaduan masyarakat atau permasalahan di daerah bidang Kesejahteraan Rakyat sehingga perlu dilakukan kunjungan kerja.
42. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, realisasi fisik/output sebesar

50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena pelaksanaan sub kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kerja DPRD lainnya dan juga adanya pengaduan masyarakat atau permasalahan di daerah bidang Perekonomian sehingga perlu dilakukan kunjungan kerja.

43. Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, realisasi fisik/output sebesar 75,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda DPRD .
44. Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100 persen.
45. Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, realisasi fisik/output sebesar 50,00 % persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan rencana aksi kegiatan sampai dengan triwulan II output kinerja belum 100 persen.
46. Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kerja DPRD.
47. Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, realisasi fisik/output sebesar 66,67 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda kerja DPRD.
48. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kerja DPRD.

49. Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi, realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda DPRD.
50. Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, realisasi fisik/output sebesar 44,44 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan agenda DPRD.
51. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, realisasi fisik/output sebesar 0,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sub kegiatan ini dilaksanakan di triwulan terakhir yaitu pada bulan Desember.
52. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, realisasi fisik/output sebesar 43,75 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena sesuai dengan agenda kegiatan DPRD.
53. Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD , realisasi fisik/output sebesar 50,00 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100,00 persen karena pelaksanaan sub kegiatan ini disesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD lainnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dirinci sebagai berikut :

- Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2023 sebesar Rp.50990287957
- Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp.34.247.923.655
- Jumlah anggaran Belanja pada APBD Pergeseran tahun 2023 sebesar Rp.34.374.851.424
- Jumlah Sub Kegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 16 (enam belas) sub kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 1 (satu) sub kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 (nol) sub kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2022 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 (nol) sub kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 ini, semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang baik yang dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian dan terimakasih.

Liwa, Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PIRWAN, SE., M.M

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690310 199803 1 006

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NAMA PD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 02	SEKRETARIAT DPRD								
4 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	81,00	0	80,00	-	-	-	-
4 02 01 2.01	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 dokumen	0 dokumen	11 dokumen	6 dokumen	54,55 %	6 dokumen	13,33 %
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	20,00 %	1 dokumen	5,00 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 laporan	0 laporan	13 laporan	6 laporan	46,15 %	6 laporan	11,54 %
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 dokumen	0 dokumen	11 dokumen	6 dokumen	54,55 %	6 dokumen	13,33 %
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen	0,00 %
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen	0,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen	0,00 %
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0 dokumen	0,00 %
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	50,00 %	1 laporan	12,50 %
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 laporan	0 laporan	13 laporan	6 laporan	46,15 %	6 laporan	11,54 %
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	0 Orang	37 Orang	35 Orang	50,00 %	35 dokumen	12,50 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00 %	6 laporan	12,50 %
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	0 laporan	1 laporan	- laporan	0,00 %	1 dokumen	0,00 %
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66,67 %	2 laporan	16,67 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023					
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 laporan	0 laporan	2 laporan	2 laporan	50,00 %	2 dokumen	12,50 %				
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00 %	1 dokumen	12,50 %				
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 dokumen	0 dokumen	37 dokumen	35 dokumen	50,00 %	35 dokumen	12,50 %
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	48 laporan	0 laporan	12 laporan	6 laporan	50,00 %	6 laporan	12,50 %
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	1 dokumen	0,00 %
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 laporan	0 laporan	3 laporan	2 laporan	66,67 %	2 laporan	16,67 %
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,00 %	2 dokumen	12,50 %
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00 %	1 dokumen	12,50 %
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	25,00 %
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00 %	6 dokumen	25,00 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	0 Orang	16 Orang	16 Orang	100,00 %	16 Orang	40,00 %
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00 %	6 dokumen	25,00 %
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	0 Orang	16 Orang	16 Orang	100,00 %	16 Orang	40,00 %
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57 Paket	0 Paket	12 Paket	7 Paket	58,33 %	7 Paket	12,28 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	0 Paket	5 Paket	3 Paket	60,00 %	3 Paket	8,33 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00 %	Paket	- %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	50,00 %	2 Paket	12,50 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	38 Paket	0 Paket	28 Paket	18 Paket	64,29 %	18 Paket	47,37 %

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	50,00 %	3 Unit	12,50 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	0 Unit	26 Unit	26 Unit	50,00 %	26 Unit	12,50 %
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	0 Unit	29 Unit	22 Unit	75,86 %	22 Unit	27,50 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0 Unit	33 Unit	20 Unit	60,61 %	20 Unit	44,44 %
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0 Unit	5 Unit	2 Unit	40,00 %	2 Unit	28,57 %
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	50,00 %	3 Unit	12,50 %
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	0 Unit	26 Unit	26 Unit	50,00 %	26 Unit	12,50 %
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	0 Unit	29 Unit	22 Unit	75,86 %	22 Unit	27,50 %
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	0 Unit	33 Unit	20 Unit	60,61 %	20 Unit	44,44 %
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0 Unit	5 Unit	2 Unit	40,00 %	2 Unit	28,57 %

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	0 paket	3 paket	3 paket	50,00 %	3 paket	12,50 %
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	0 %	100,00 %	33,80 %	33,80 %	7,70 %	7,70 %
		Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100 %	0 %	100,00 %	33,33 %	33,33 %	8,33 %	8,33 %
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	1 dokumen	14,29 %	1 dokumen	3,57 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	0 dokumen	- dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	28 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	1 dokumen	14,29 %	1 dokumen	3,57 %
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 laporan	0 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00 %	2 laporan	10,00 %
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 laporan	0 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00 %	2 laporan	10,00 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 laporan	0 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00 %	2 laporan	10,00 %
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	20 laporan	0 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00 %	2 laporan	10,00 %
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 laporan	0 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00 %	2 laporan	10,00 %
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 laporan	0 laporan	4 laporan	2 laporan	50,00 %	2 laporan	10,00 %
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	0 dokumen	- dokumen	- dokumen	- %	- dokumen	0,00 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75,00 %	3 dokumen	12,50 %
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00 %	6 dokumen	12,50 %

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023					
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4				
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	0 Orang	6 Orang	6 Orang	50,00 %	6 Orang	25,00 %				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %				
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokumen	0 dokumen	- dokumen	- %	- dokumen	0,00 %	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75,00 %	3 dokumen	12,50 %
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00 %	6 dokumen	12,50 %
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	0 Orang	6 Orang	6 Orang	50,00 %	6 Orang	12,50 %
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	- dokumen	0,00 %	- dokumen	0,00 %
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	18 laporan	0 laporan	3 laporan	2 laporan	66,67 %	2 laporan	11,11 %
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	25,00 %
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00 %	1 dokumen	9,09 %
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	18 laporan	0 laporan	3 laporan	2 laporan	66,67 %	2 laporan	11,11 %
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	25,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00 %	1 dokumen	9,09 %
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- %	- dokumen	- %
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- %	- dokumen	- %
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	16 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50,00 %	2 dokumen	12,50 %
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	16 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50,00 %	2 dokumen	12,50 %
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	44,44 %	4 dokumen	6,45 %
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 laporan	0 laporan	1 laporan	- laporan	0,00 %	- laporan	0,00 %
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	64 dokumen	0 dokumen	16 dokumen	7 dokumen	43,75 %	7 dokumen	10,94 %
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49 dokumen	0 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	50,00 %	5 dokumen	10,20 %
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	62 dokumen	0 dokumen	9 dokumen	4 dokumen	44,44 %	4 dokumen	6,45 %
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 laporan	0 laporan	1 laporan	- laporan	0,00 %	- laporan	0,00 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026	-	Target Kinerja DPA Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
										Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 5+7	10 = 9/4
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	64 dokumen	0 dokumen	16 dokumen	7 dokumen	43,75 %	7 dokumen	10,94 %
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	49 dokumen	0 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	50,00 %	5 dokumen	10,20 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Ke
						Sebelum Perubahan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	02				SEKRETARIAT DPRD	
4	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
4	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	02	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

4	02	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	02	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4	02	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
4	02	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4	02	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	02	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

4	02	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
4	02	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4	02	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4	02	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4	02	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

4	02	001	2.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4	02	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4	02	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4	02	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4	02	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
4	02	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

4	02	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
4	02	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
4	02	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

4	02	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	02	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	02	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
4	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

4	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
						Jumlah Mebel yang Dipelihara
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
4	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
4	02	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
4	02	001	2.09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara

4	02	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
4	02	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
4	02	001	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Jenis Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
4	02	001	2.15	001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
4	02	001	2.15	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan

4	02	001	2.15	003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD
4	02	001	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan
4	02	001	2.16	001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
4	02	001	2.16	002	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD
4	02	001	2.16	004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan

4	02	002			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
						Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat
4	02	002	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
4	02	002	2.01	001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	002	2.01	002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4	02	002	2.01	004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi

4	02	002	2.01	005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun
4	02	002	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
4	02	002	2.02	001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
4	02	002	2.02	002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

4	02	002	2.02	003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
4	02	002	2.02	004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
4	02	002	2.02	006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4	02	002	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Perekonomian
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	002	2.03	001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum

4	02	002	2.03	003	Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Urusan Bidang	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	002	2.03	004	Pengawasan Pemerintahan Perekonomian	Urusan Bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	002	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
							Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi

4	02	002	2.04	001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
4	02	002	2.04	002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
4	02	002	2.04	003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	002	2.04	004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	02	002	2.04	005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
4	02	002	2.04	006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

4	02	002	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
4	02	002	2.05	001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
4	02	002	2.05	002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
4	02	002	2.05	003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
4	02	002	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD

4	02	002	2.06	001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
4	02	002	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
4	02	002	2.07	002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
4	02	002	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
4	02	002	2.08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

4	02	002	2.08	002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
4	02	002	2.08	003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4	02	002	2.08	004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Renja Murni
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
			50.990.287.957
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80 %	80 %	25.032.401.157
Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	187.760.000
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	16.930.000
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.010.000

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.605.000
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.125.000
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.010.000
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.870.000
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan	104.210.000
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.953.087.677

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	35 Orang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	35 Orang	2.900.303.677
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.800.000

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	11.000.000
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.984.000
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.370.000
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.370.000
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	6 Dokumen	345.875.000
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	32 Orang	

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen	6 Dokumen	10.525.000
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	32 Orang	335.350.000
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	90 Dokumen	73 Dokumen	3.445.866.750
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	10 Laporan	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	12 Paket	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	12 Paket	228.785.000
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	306.868.750
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.080.000
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	317.350.000

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	73 Dokumen	73 Dokumen	1.374.600.000
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1 Laporan	199.700.000
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	988.483.000
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	469.542.800
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	10.500.000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	165.000.000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	294.042.800

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1.163.838.630
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	
Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	53 Unit	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	39 Unit	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	214.595.000
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	344.804.000
Jumlah Mebel yang Dipelihara	69 Unit	53 Unit	23.400.000

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	39 Unit	107.908.500
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	473.131.130
Jumlah Jenis Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	35 Orang	35 Orang	15.449.569.300
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	35 Orang	14.539.113.300
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		458.050.000

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	452.406.000
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.011.491.000
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	1 Laporan	12 Laporan	
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	71.500.000
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	139.635.000
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	800.356.000

Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00 %	100,00 %	25.957.886.800
Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100,00 %	100,00 %	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	850.939.500
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.613.000
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	109.922.500
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	728.404.000

Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	238.940.000
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	29.187.500
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	29.187.500

Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	59.605.000
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.355.000
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	59.605.000
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	4 Laporan	460.349.300
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	4 Laporan	153.631.300

Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 Laporan	4 Laporan	153.359.000
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	4 Laporan	153.359.000
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	9.236.682.000
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	12 Dokumen	
Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	8 Orang	
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	-
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	3.161.814.000
Jumlah Dokumen Hasil Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	356 Dokumen	12 Dokumen	2.350.656.000
Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	8 Orang	345.988.000
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	267.723.000
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	3.110.501.000

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	2.951.171.000
Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	6 Laporan	
Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	6 Laporan	285.946.000
Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	22.441.000
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	2.642.784.000
Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen		-

Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen		-
Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	379.961.000
Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	379.961.000
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	16 Dokumen	11.839.844.000
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	18 Dokumen	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14 Dokumen	11 Dokumen	
Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	11 Dokumen	6.414.100.000

Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	38.735.000
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	16 Dokumen	200.928.000
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	18 Dokumen	5.186.081.000

LA

Perubahan RENJA Perangkat Daer

Pagu Indikatif		
APBD Murni	APBD Pergeseran	Perubahan Renja
34.247.923.655	34.374.851.424	41.520.117.405
21.600.411.455	21.612.519.224	21.917.164.205
177.802.500	177.802.500	177.802.500
14.675.000	14.675.000	14.675.000
10.792.500	10.792.500	10.792.500

13.605.000	13.605.000	13.605.000
13.125.000	13.125.000	13.125.000
13.010.000	13.010.000	13.010.000
12.870.000	12.870.000	12.870.000
99.725.000	99.725.000	99.725.000
2.958.348.600	2.799.657.619	2.797.318.400

2.912.600.600	2.753.909.619	2.751.570.400
10.000.000	10.000.000	10.000.000
10.800.000	10.800.000	10.800.000

10.000.000	10.000.000	10.000.000
11.000.000	11.000.000	11.000.000
3.948.000	3.948.000	3.948.000
5.370.000	5.370.000	5.370.000
5.370.000	5.370.000	5.370.000
152.840.000	152.840.000	298.360.000

-	15.924.000	26.471.000
143.706.250	143.706.250	143.706.250
19.500.000	19.500.000	23.300.000
202.885.000	202.885.000	202.885.000

1.298.050.000	1.319.650.000	1.319.650.000
109.550.000	109.550.000	109.550.000
51.372.000	43.740.750	122.554.750
-	-	-
-	-	-

-	-	-
355.445.800	355.445.800	366.993.000
7.250.000	7.250.000	7.250.000
165.000.000	165.000.000	165.000.000
183.195.800	183.195.800	194.743.000

643.457.005	516.707.005	553.463.005
137.400.000	137.400.000	137.400.000
305.600.000	178.850.000	178.850.000
12.900.000	12.900.000	24.000.000

87.365.875	87.365.875	95.998.375
100.191.130	100.191.130	117.214.630
14.539.113.300	14.806.769.300	14.826.769.300
14.539.113.300	14.539.113.300	14.559.113.300

-	267.656.000	267.656.000
942.971.000	942.971.000	942.971.000
42.980.000	42.980.000	42.980.000
99.635.000	99.635.000	99.635.000
800.356.000	800.356.000	800.356.000

12.647.512.200	12.762.332.200	19.602.953.200
308.530.000	308.530.000	308.530.000
10.788.000	10.788.000	10.788.000
60.590.000	60.590.000	60.590.000
237.152.000	237.152.000	237.152.000

199.715.000	199.715.000	199.715.000
29.187.500	29.187.500	29.187.500
29.187.500	29.187.500	29.187.500

46.780.000	46.780.000	46.780.000
47.405.000	47.405.000	47.405.000
47.155.000	47.155.000	47.155.000
299.132.900	299.132.900	299.132.900
99.674.900	99.674.900	99.674.900

1.760.000.000	1.760.000.000	2.616.423.000
1.670.656.000	2.121.656.000	3.677.666.000
		-
145.052.300	145.052.300	145.052.300
46.140.000	46.140.000	46.140.000

2.481.363.000	1.725.199.000	2.673.636.000
176.645.000	176.645.000	347.915.000
4.717.000	4.717.000	4.717.000
2.300.001.000	1.543.837.000	2.321.004.000
-	-	-

-	-	-
199.491.000	199.475.000	216.545.000
199.491.000	199.475.000	216.545.000
5.537.432.000	5.957.432.000	9.420.113.000
2.739.310.000	2.943.310.000	3.691.610.000

32.968.000	32.968.000	-
131.579.000	131.579.000	-
2.633.575.000	2.849.575.000	5.728.503.000

IMPIRAN II

arah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2023

Alasan Perubahan (Dibanding APBD Murni)	Lokasi		Sumbe
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan
-			
-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pengurangan Gaji	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	- Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	- Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	- Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	-		
	- Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Perlunya penambahan pengadaan listrik/penerangan kantor	penambahan perlengkapan gedung	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
Perlunya penambahan tabung gas pemadam kebakaran	pengisian tabung gas	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku
		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Adanya penambahan agenda koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
-			
-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Perlunya penambahan belanja alat kebersihan kantor	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Perlunya perbaikan beberapa buah mebeluair yang dalam kondisi kurang baik	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Perlunya perbaikan beberapa peralatan dan mesin yang dalam kondisi kurang baik	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Perlunya penambahan alat kebersihan rumah pimpinan	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penambahan Pungutan Pajak yang menjadi beban Daerah	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penambahan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka penambahan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penambahan kegiatan publikasi kegiatan DPRD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Penambahan agenda kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan dan anggota DPRD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Penambahan kegiatan reses dari 2 kali menjadi 3 kali.	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penambahan belanja cetak foto kegiatan DPRD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penambahan agenda kegiatan Pimpinan DPRD	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Penambahan agenda kegiatan Pimpinan DPRD		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

r Dana	Prioritas		Kelomp
	Nasional	Daerah	Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan			
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan DPRD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Aparatur dan Anggota DPRD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD

		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Anggota DPRD, Aparatur dan Masyarakat

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	DPRD dan Masyarakat
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	DPRD dan Masyarakat
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	DPRD dan Masyarakat

		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan Sektor Pariwisata	DPRD dan Aparatur
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas	Pimpinan dan Anggota DPRD

	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
lok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
Setelah Perubahan			
		60.657.246.600	
	80 %	30.749.157.000	
	5 Dokumen	215.500.000	
	11 Dokumen		
	13 Laporan		
Aparatur	11 Dokumen	23.500.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	1 Dokumen	15.000.000	Sekretariat DPRD

Aparatur	1 Dokumen	14.250.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	1 Dokumen	14.500.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	1 Dokumen	14.250.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	1 Laporan	14.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	13 Laporan	120.000.000	Sekretariat DPRD
	3 Dokumen	3.062.500.000	

	1 Dokumen		
	12 Dokumen		
	40 Orang		
	18 Laporan		
	1 Laporan		
Aparatur	36 Orang	3.000.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	12 Dokumen	12.500.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	1 Laporan	12.500.000	Sekretariat DPRD

Aparatur	3 Dokumen	12.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	18 Laporan	13.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	1 Dokumen	12.500.000	Sekretariat DPRD
		5.907.000	
Aparatur	1 Dokumen	5.907.000	Sekretariat DPRD
	6 Dokumen	388.500.000	
	35 Orang		

Aparatur	6 Dokumen	13.500.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	35 Orang	375.000.000	Sekretariat DPRD
	90 Dokumen	4.523.000.000	
	1 Laporan		
	15 Laporan		
	2 Paket		
	29 Paket		
	14 Paket		
	6 Paket		

	0 Paket		
Aparatur dan Anggota DPRD	13 Paket	50.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur dan Anggota DPRD	5 Paket	500.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan DPRD	0 Paket	650.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur dan Anggota DPRD	2 Paket	35.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur dan Anggota DPRD	29 Paket	345.000.000	Sekretariat DPRD

Aparatur dan Anggota DPRD	73 Dokumen	1.650.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur dan Anggota DPRD	12 Laporan	225.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur	12 Laporan	1.068.000.000	Sekretariat DPRD
	0 Unit	2.550.000.000	
	0 Unit		
Pimpinan DPRD	0 Unit	2.000.000.000	Sekretariat DPRD

Pimpinan DPRD	0 Unit	550.000.000	Sekretariat DPRD
	1 Laporan	547.500.000	
	1 Laporan		
	1 Laporan		
Aparatur dan Anggota DPRD	12 Laporan	12.500.000	Sekretariat DPRD
Aparatur dan Anggota DPRD	12 Laporan	185.000.000	Sekretariat DPRD
Aparatur dan Anggota DPRD	12 Laporan	350.000.000	Sekretariat DPRD

	5 Unit	1.600.000.000	
	26 Unit		
	3 Unit		
	69 Unit		
	33 Unit		
Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur	3 Unit	300.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur	26 Unit	385.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur	69 Unit	30.000.000	Sekretariat DPRD

Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur	32 Unit	135.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan, Anggota DPRD dan Aparatur	5 Unit	750.000.000	Sekretariat DPRD
	35 Orang	16.491.250.000	
	35 Orang		
	4 Paket		
Anggota DPRD	35 Orang	15.000.000.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD	4 Paket	1.166.250.000	Sekretariat DPRD

Anggota DPRD	35 Orang	325.000.000	Sekretariat DPRD
	1 Dokumen	1.365.000.000	
	1 Laporan		
	3 Paket		
Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	375.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	165.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Paket	825.000.000	Sekretariat DPRD

	100,00 %	29.908.089.600	
	100 %		
	7 Dokumen	1.165.000.000	
	1 Dokumen		
	2 Dokumen		
Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	15.000.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD dan Aparatur	7 Dokumen	135.000.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD dan Aparatur	2 Dokumen	815.000.000	Sekretariat DPRD

Anggota DPRD dan Aparatur	0 Dokumen	200.000.000	Sekretariat DPRD
	1 Dokumen	267.760.000	
	1 Dokumen		
	1 Dokumen		
	1 Dokumen		
	1 Dokumen		
Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	33.000.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	33.000.000	Sekretariat DPRD

Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	67.000.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	67.760.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD dan Aparatur	1 Dokumen	67.000.000	Sekretariat DPRD
	4 Laporan	570.000.000	
	4 Laporan		
	4 Laporan		
Anggota DPRD, Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	190.000.000	Sekretariat DPRD

Anggota DPRD, Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	190.000.000	Sekretariat DPRD
Anggota DPRD, Aparatur dan Masyarakat	5 Laporan	190.000.000	Sekretariat DPRD
	6 Dokumen	10.731.551.100	
	5 Dokumen		
	0 Dokumen		
	3 Dokumen		
	8 Orang		
	6 Orang		

DPRD, Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	450.000.000	Sekretariat DPRD
DPRD, Aparatur dan Masyarakat	6 Dokumen	3.500.000.000	Sekretariat DPRD
DPRD, Aparatur dan Masyarakat	356 Dokumen	2.650.000.000	Sekretariat DPRD
DPRD, Aparatur dan Masyarakat	8 Orang	400.000.000	Sekretariat DPRD
DPRD, Aparatur dan Masyarakat	6 Orang	310.000.000	Sekretariat DPRD
DPRD, Aparatur dan Masyarakat	5 Dokumen	3.421.551.100	Sekretariat DPRD

	3 Dokumen	3.369.200.000	
	1 Dokumen		
	3 Laporan		
	3 Laporan	364.200.000	Sekretariat DPRD
DPRD dan Masyarakat	1 Dokumen	55.000.000	Sekretariat DPRD
DPRD dan Masyarakat	3 Dokumen	2.950.000.000	Sekretariat DPRD
	0 Dokumen	190.098.000	

	0 Dokumen	190.098.000	Sekretariat DPRD
	4 Dokumen	417.951.000	
	4 Dokumen	417.951.000	Sekretariat DPRD
	4 Dokumen	13.196.529.500	
	10 Dokumen		
	14 Dokumen		
	1 Laporan		
Pimpinan dan Anggota DPRD	13 Dokumen	7.100.000.000	Sekretariat DPRD

Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	43.500.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD	16 Dokumen	210.000.000	Sekretariat DPRD
Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Dokumen	5.843.029.500	Sekretariat DPRD

Perangkat Daerah	Anggaran	
	Excel RKPD	APBD Murni
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	#REF!	#REF!
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	#REF!	#REF!
1.03.1.04.2.10.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	#REF!	#REF!
1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	#REF!	#REF!
1.05.0.00.0.00.25.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	#REF!	#REF!
1.06.0.00.0.00.05.0000 Dinas Sosial	#REF!	#REF!
2.08.2.14.0.00.11.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	#REF!	#REF!
2.09.0.00.0.00.07.0000 Dinas Ketahanan Pangan	#REF!	#REF!
2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup	#REF!	#REF!
2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	#REF!	#REF!
2.13.0.00.0.00.10.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	#REF!	#REF!
2.15.0.00.0.00.12.0000 Dinas Perhubungan	#REF!	#REF!
2.16.2.20.2.21.13.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	#REF!	#REF!
2.17.3.30.3.31.14.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	#REF!	#REF!
2.18.0.00.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	#REF!	#REF!
2.19.3.26.0.00.16.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	#REF!	#REF!
2.23.2.24.0.00.17.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	#REF!	#REF!
3.25.0.00.0.00.18.0000 Dinas Perikanan	#REF!	#REF!
3.27.0.00.0.00.19.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	#REF!	#REF!
3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan	#REF!	#REF!
4.01.2.07.0.00.28.0000 Sekretariat Daerah	#REF!	#REF!
4.02.0.00.0.00.27.0000 Sekretariat DPRD	50.990.287.957	34.247.923.655
5.01.0.00.0.00.21.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	#REF!	#REF!
5.02.0.00.0.00.22.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	#REF!	#REF!
5.03.5.04.0.00.23.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	#REF!	#REF!
5.05.0.00.0.00.24.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan	#REF!	#REF!
6.01.0.00.0.00.29.0000 Inspektorat Daerah	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Sumber Jaya	#REF!	#REF!

7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Way Tenong	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Sekincau	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Belalau	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Batu Brak	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Balik Bukit	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sukau	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Suoh	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Gedung Surian	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Kebun Tebu	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Air Hitam	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Pagar dewa	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Batu Ketulis	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Bandar Negeri Suoh	#REF!	#REF!
7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Lumbok Seminung	#REF!	#REF!
8.01.0.00.0.00.26.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!

1.531.389.131.753 980.339.061.161
#REF! #REF!

#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

984.959.704.911

#REF!

#REF!